



# BUPATI EMPAT LAWANG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI EMPAT LAWANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyesuaian terhadap program dan/atau kegiatan diperlukan penambahan dan/atau pengurangan serta pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
29. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2014.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**dan**

**BUPATI EMPAT LAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.777.963.715.826,68 bertambah sejumlah Rp. 129.276.859.038,83 sehingga menjadi Rp. 907.240.574.865,51 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 736.493.845.254,55
b. Bertambah	<u>Rp. 94.957.720.580,51</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 831.451.565.835,06

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 777.963.715.826,68
b. Bertambah	<u>Rp. 129.276.859.038,83</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 907.240.574.865,51</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. (75.789.009.030,45)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp. 46.469.870.572,13
2. Bertambah	<u>Rp. 39.319.138.458,32</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 85.789.009.030,45
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 75.789.009.030,45

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan Rp. NIHIL

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 20.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 212.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 20.212.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 651.895.020.252,55

2. Bertambah Rp. 24.417.694.107,51

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 676.312.714.360,06

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 64.598.825.002,00

2. Bertambah Rp. 70.328.026.473,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 134.926.851.475,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 8.321.970.000,00

2. Bertambah / Berkurang Rp. NIHIL

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 8.321.970.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 1.003.030.000,00

2. Bertambah Rp. 212.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 1.215.030.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 5.500.000.000,00

2. Bertambah / Berkurang Rp. NIHIL

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.500.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 5.175.000.000,00

2. Bertambah / Berkurang Rp. NIHIL

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 5.175.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp. 228.144.369.252,55	
2. Bertambah	<u>Rp. 24.417.694.107,51</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 252.562.063.360,06
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp. 360.871.981.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		Rp. 360.871.981.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp. 62.878.670.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp. 62.878.670.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. NIHIL
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp. NIHIL	
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp. 16.249.347.086,00	
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 2.098.500.114,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp. 18.347.847.200,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp. 28.586.875.916,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 25.294.258.359,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 53.881.134.275,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp. 19.762.602.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 42.935.268.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 62.697.870.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 277.556.210.481,00
2. Bertambah	<u>Rp. 7.951.855.015,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 285.508.065.496,00

b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 500.407.505.345,68
2. Bertambah	<u>Rp. 121.325.004.023,83</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 621.732.509.369,51

(2) Belanja Tidak langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 244.475.270.886,00
2. Berkurang	<u>Rp. (2.272.705.860,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 242.202.565.026,00

b. Belanja Bunga	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. NIHIL

c. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp. 600.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 600.000.000,00

d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp. 4.945.168.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. (963.200.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 3.981.968.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp. 970.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 985.000.000,00

f. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp. NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. NIHIL

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	
1. Semula	Rp. 16.565.771.595,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. NIHIL</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/  
Kota Dan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 16.565.771.595,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 10.000.000.000,00  
2. Bertambah Rp. 11.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 21.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 14.869.925.900,00  
2. Bertambah Rp. 1.896.294.720,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 16.766.220.620,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 195.831.823.652,68  
2. Bertambah Rp. 21.164.051.318,83

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 216.995.874.971,51

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 289.705.755.793,00  
2. Bertambah Rp. 98.264.657.985,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 387.970.413.778,00

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp. 46.469.870.572,13  
2. Bertambah Rp. 39.319.138.458,32

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 85.789.009.030,45

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp. 5.000.000.000,00  
2. Bertambah / Berkurang Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula Rp. 40.416.910.515,27  
2. Bertambah Rp. 39.319.138.458,32

Jumlah SILPA tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 79.736.048.973,59

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. NI H I L  
2. Bertambah / Berkurang Rp. NI H I L



Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	NIHIL
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah		
1. Semula	Rp.	NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	NIHIL
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp.	NIHIL
2. Berkurang / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	NIHIL
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1. Semula	Rp.	6.052.960.056,86
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	6.052.960.056,86
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. Semula	Rp.	NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	NIHIL
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1. Semula	Rp.	NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		
1. Semula	Rp.	NIHIL
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan	Rp.	NIHIL

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Perubahan RAPBD;
2. Lampiran II. Ringkasan RAPBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III. Rincian RAPBD Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII. Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII. Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII. Daftar Pinjaman Daerah;

## **Pasal 6**

Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 11 September 2014

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 12 September 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

  
**H. AKHMAD BASRI SONI, SH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN I**  
**RINGKASAN APBD**

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>736.493.845.254,55</b>	<b>831.451.565.835,06</b>	<b>94.957.720.580,51</b>	<b>12,89</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.212.000.000,00</b>	<b>212.000.000,00</b>	<b>1,06</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	8.321.970.000,00	8.321.970.000,00	0,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.003.030.000,00	1.215.030.000,00	212.000.000,00	21,13
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.175.000.000,00	5.175.000.000,00	0,00	0,00
4.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>651.895.020.252,55</b>	<b>676.312.714.360,06</b>	<b>24.417.694.107,51</b>	<b>3,74</b>
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	228.144.369.252,55	252.562.063.360,06	24.417.694.107,51	10,70
4.2.2	Dana alokasi umum	360.871.981.000,00	360.871.981.000,00	0,00	0,00
4.2.3	Dana alokasi khusus	62.878.670.000,00	62.878.670.000,00	0,00	0,00
4.3	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>64.598.825.002,00</b>	<b>134.926.851.475,00</b>	<b>70.328.026.473,00</b>	<b>108,86</b>
4.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	16.249.347.086,00	18.347.847.200,00	2.098.500.114,00	12,91
4.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	28.586.875.916,00	53.881.134.275,00	25.294.258.359,00	88,48
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	19.762.602.000,00	62.697.870.000,00	42.935.268.000,00	217,25
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>736.493.845.254,55</b>	<b>831.451.565.835,06</b>	<b>94.957.720.580,51</b>	<b>12,89</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>777.963.715.826,68</b>	<b>907.240.574.865,51</b>	<b>129.276.859.038,83</b>	<b>16,61</b>
5.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>277.556.210.481,00</b>	<b>285.508.065.496,00</b>	<b>7.951.855.015,00</b>	<b>2,86</b>
5.1.1	Belanja pegawai	244.475.270.886,00	242.091.558.871,00	(2.383.712.015,00)	0,97
5.1.3	Belanja subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja hibah	4.945.168.000,00	4.265.735.030,00	(679.432.970,00)	13,73
5.1.5	Belanja bantuan sosial	970.000.000,00	985.000.000,00	15.000.000,00	1,54
5.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	16.565.771.595,00	16.565.771.595,00	0,00	0,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	21.000.000.000,00	11.000.000.000,00	110,00
5.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>500.407.505.345,68</b>	<b>621.732.509.369,51</b>	<b>121.325.004.023,83</b>	<b>24,24</b>
5.2.1	Belanja pegawai	14.869.925.900,00	16.766.220.620,00	1.896.294.720,00	12,75
5.2.2	Belanja barang dan jasa	195.831.823.652,68	216.995.874.971,51	21.164.051.318,83	10,80
5.2.3	Belanja Modal	289.705.755.793,00	387.970.413.778,00	98.264.657.985,00	33,91
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>777.963.715.826,68</b>	<b>907.240.574.865,51</b>	<b>129.276.859.038,83</b>	<b>16,61</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(41.469.870.572,13)</b>	<b>(75.789.009.030,45)</b>	<b>(34.319.138.458,32)</b>	<b>82,75</b>
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>41.469.870.572,13</b>	<b>75.789.009.030,45</b>	<b>34.319.138.458,32</b>	<b>82,75</b>
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>46.469.870.572,13</b>	<b>85.789.009.030,45</b>	<b>39.319.138.458,32</b>	<b>84,61</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.416.910.515,27	79.736.048.973,59	39.319.138.458,32	97,28
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	6.052.960.056,86	6.052.960.056,86	0,00	0,00
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>41.469.870.572,13</b>	<b>75.789.009.030,45</b>	<b>34.319.138.458,32</b>	<b>82,75</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bupati Empat Lawang

H. BUDI ANTONI ALJUFRI